



JURNAL RISET DAN INOVASI PENDIDIKAN SAINS (JRIPS)

Vol. 5 No. 1 (2026) pp. 13-31

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JRIPS/>

p-ISSN: 2809-5200 e-ISSN: 2809-5219

KENDALA IMPLEMENTASI EVALUASI PEMBELAJARAN DIGITAL DI LPTK (Studi Komparatif Dua Institusi di Aceh)

Eva Nauli Taib^{1*}, Rahmi Fhonna², Nurlia Zahara³, Riska Yuliani⁴, Fathia Bardepi⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Corresponden Author : evanaulitaib@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Implementasi evaluasi pembelajaran digital di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas proses penilaian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kendala implementasi evaluasi digital serta merumuskan strategi penguatan berdasarkan karakteristik kelembagaan. Penelitian menggunakan desain *sequential explanatory mixed methods* dengan subjek penelitian berjumlah 121 responden di FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama yang terdiri dari unsur struktural, dosen, dan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui angket dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian mengungkapkan kendala multidimensional yang mencakup: (1) aspek infrastruktur teknis (ketidakstabilan jaringan dan fragmentasi platform); (2) aspek kebijakan (ketiadaan SOP dan lemahnya monitoring); (3) aspek pelatihan dan dukungan teknis (pelatihan belum sistematis dan tidak ada helpdesk); serta (4) aspek kompetensi SDM (kesenjangan literasi digital). Analisis komparatif menunjukkan bahwa FTK UIN Ar-Raniry menghadapi kendala birokrasi koordinasi meskipun memiliki infrastruktur terpusat, sementara FKIP Universitas Abulyatama menghadapi fragmentasi platform meskipun memiliki fleksibilitas adopsi. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup empat pilar: peningkatan infrastruktur teknologi, pembentukan unit dukungan teknis, penyusunan SOP evaluasi digital, dan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan yang harus diimplementasikan secara sistematis dan kontekstual berdasarkan karakteristik institusi.

Kata Kunci: Evaluasi digital, kendala implementasi, LPTK, strategi penguatan, *mixed methods*

PENDAHULUAN

Era masyarakat modern saat ini, transformasi digital dalam pendidikan tinggi telah menjadi keharusan global termasuk dalam aspek evaluasi pembelajaran. Digitalisasi evaluasi tidak hanya menawarkan efisiensi administratif, tetapi juga membuka peluang pengembangan instrumen penilaian yang lebih inovatif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan akademik ((Awang, 2021; Kodri, 2022). Namun, percepatan transformasi digital ini sering kali tidak

diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan kebijakan kelembagaan yang memadai, sehingga implementasinya belum optimal di banyak institusi pendidikan tinggi (Kambau, 2024)

Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam transformasi digital pendidikan karena lulusannya akan menjadi agen perubahan di sekolah. Implementasi evaluasi digital di LPTK tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu internal pembelajaran, tetapi juga membentuk literasi digital calon guru yang akan mentransfer praktik evaluasi digital ke jenjang pendidikan berikutnya (Nurjannah et al., 2024). Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa evaluasi digital di pendidikan tinggi masih menghadapi kendala multidimensional, meliputi keterbatasan sistem pendukung dan tenaga ahli, lemahnya integrasi kerangka evaluasi dengan aspek pedagogik, rendahnya literasi dan efikasi digital dosen, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi digital dalam pengambilan keputusan kurikulum dan manajemen akademik (Kamilia & Wahyudin, 2021; Tsani et al., 2020).

Penelitian terdahulu umumnya mengelompokkan kendala implementasi evaluasi digital ke dalam aspek teknis dan infrastruktur, kebijakan dan tata kelola, serta kompetensi sumber daya manusia. Kendala tersebut mencakup keterbatasan akses dan kapasitas infrastruktur teknologi, ketiadaan standar operasional prosedur dan sistem monitoring–evaluasi yang terintegrasi, serta kesenjangan literasi digital dan kesiapan dosen dalam mengimplementasikan evaluasi berbasis teknologi (Ate et al., 2021, 2021; Ertmer et al., 2006; Esteve-Mon et al., 2023; Teo & Zhou, 2014). Studi lain menegaskan bahwa kesiapan institusi dan kompetensi dosen merupakan faktor kunci keberhasilan adopsi inovasi pembelajaran digital, termasuk evaluasi (Ulimaz et al., 2024; Werdiningsih et al., 2022)

Dalam konteks Indonesia, khususnya wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital seperti Provinsi Aceh, tantangan implementasi evaluasi digital menjadi lebih kompleks. Disparitas akses internet, variasi kualitas fasilitas teknologi, serta perbedaan tingkat literasi digital antar institusi masih menjadi hambatan struktural yang signifikan (Fathushahib et al., 2021; Irfan et al., 2022). Selain itu, perbedaan karakteristik kelembagaan—seperti status perguruan tinggi negeri dan swasta, dukungan anggaran, serta kebijakan digitalisasi—berpotensi menghasilkan pola kendala implementasi yang berbeda (Aydın & Tasci, 2005).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kesiapan e-learning dan evaluasi digital di pendidikan tinggi, kajian yang secara komprehensif memetakan kendala implementasi evaluasi pembelajaran digital di LPTK dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, khususnya melalui perspektif multi-stakeholder (struktural, dosen, dan mahasiswa), masih terbatas. FTK UIN Ar-Raniry sebagai LPTK negeri dan FKIP Universitas Abulyatama sebagai LPTK swasta di Aceh sama-sama telah mengimplementasikan evaluasi digital dalam pembelajaran, namun memiliki perbedaan karakteristik kelembagaan dalam konteks geografis dan sosio-kultural yang relatif serupa. Hingga kini, belum terdapat kajian yang secara

sistematis mengidentifikasi dan membandingkan kendala implementasi evaluasi digital di kedua institusi tersebut dari perspektif multi-stakeholder, padahal pemetaan kendala yang kontekstual dan berbasis bukti empiris sangat penting untuk merumuskan strategi penguatan evaluasi digital yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala implementasi evaluasi pembelajaran digital pada dua LPTK di Provinsi Aceh dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, guna memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan dan praktik evaluasi digital yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, sebagaimana dijelaskan Creswell dan Plano Clark, (2018), yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan awal. Penelitian dilaksanakan pada dua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Aceh, yaitu: (1) Program Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Abulyatama pada tanggal 02 sampai 03 Oktober 2025; dan (2) Program Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa Inggris FTK UIN Ar-Raniry pada tanggal 07 sampai 09 Oktober 2025. Pemilihan kedua lokasi ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan: (a) kedua institusi telah mengimplementasikan evaluasi digital dalam pembelajaran; (b) memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda (negeri dan swasta) sehingga memungkinkan analisis komparatif; (c) keterjangkauan lokasi penelitian; dan (d) kesediaan institusi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok responden utama di dua institusi LPTK di Aceh, yaitu FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama. Total responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 121 orang, dengan rincian 82 responden dari FTK UIN Ar-Raniry dan 39 responden dari FKIP Universitas Abulyatama. Ketiga kelompok responden mencakup unsur struktural fakultas, dosen, dan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa Inggris di masing-masing institusi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive untuk unsur struktural dan dosen, serta convenience sampling untuk mahasiswa dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kesediaan berpartisipasi. Berikut data lengkap responden tersaji dalam Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan desain metode campuran dengan dua tahapan, yaitu tahap kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif, data dikumpulkan melalui angket terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator *Digital Readiness Framework* (Chounta et al., 2024) yang mencakup empat dimensi utama saja: infrastruktur, kebijakan dan strategi, pelatihan dan dukungan teknis, serta kompetensi pengguna. Instrumen angket juga dilengkapi dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman responden secara lebih komprehensif.

Untuk menjamin kevalidan instrumen, angket yang dikembangkan terlebih dahulu melalui proses validasi ahli (expert judgment) dengan melibatkan empat

validator, yang terdiri atas ahli evaluasi pendidikan, ahli teknologi pembelajaran, ahli metodologi penelitian, dan praktisi pendidikan tinggi yang berpengalaman dalam implementasi e-learning. Validasi difokuskan pada kesesuaian indikator dengan konstruk yang diukur, kejelasan redaksi butir, relevansi konteks penelitian, dan keterbacaan instrumen. Masukan dari para validator digunakan sebagai dasar revisi instrumen sebelum pengumpulan data, sesuai dengan rekomendasi prosedur pengembangan instrumen dalam penelitian metode campuran (Creswell & Creswell, 2017).

Tahap kualitatif dilaksanakan setelah analisis data kuantitatif selesai. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur struktural, dosen, dan mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan panduan Creswell & Creswell (2017). Wawancara difokuskan pada pendalaman faktor penyebab kendala, pengalaman empiris selama implementasi evaluasi digital, serta strategi penguatan yang direkomendasikan. Seluruh hasil wawancara dituangkan dalam catatan lapangan dan dikonfirmasi kembali kepada responden (member checking) untuk menjaga kredibilitas dan validitas data. Berikut data responden yang tersaji dalam Tabel 1.

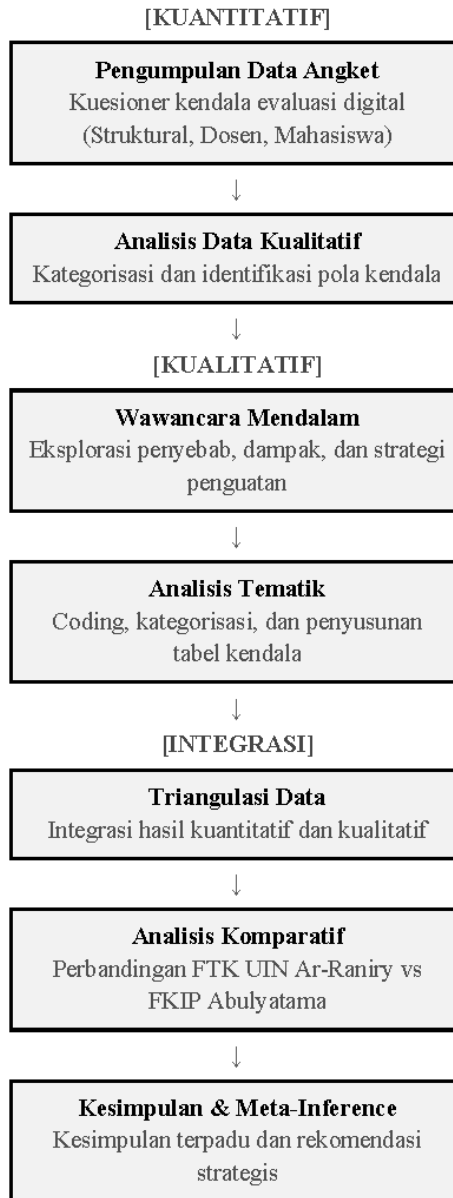
Tabel 1. Data Responden

Kelompok Responden	FTK UIN Ar-Raniry	FKIP Albuyatama	Total
Struktural (Wadek 1, Wadek 2, operator fakultas, Kaprodi Biologi, Kaprodi B. Inggris, operator prodi)	7	2	9
Dosen Pendidikan Biologi	5	0	5
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris	5	1	6
Mahasiswa Pendidikan Biologi (Semester 5+)	32	34	66
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (Semester 5+)	33	2	33
Jumlah Responden	82	39	121

Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan mengidentifikasi pola jenis kendala pada setiap dimensi, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dianjurkan oleh Sugiyono (2016) melalui proses membaca data, pemberian kode, kategorisasi tema, dan penarikan makna. Hasil analisis kedua tahap kemudian diintegrasikan melalui triangulasi sumber untuk membandingkan kesesuaian informasi dari ketiga kelompok responden. Integrasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala umum, kendala spesifik, serta perbedaan persepsi.

Penelitian ini juga menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan pola kendala antara dua institusi LPTK. Perbandingan dilakukan pada setiap

dimensi kendala untuk melihat kesamaan, perbedaan, dan tingkat keparahan masing-masing kendala berdasarkan karakteristik kelembagaan. Hasil integrasi kuantitatif, kualitatif, dan komparatif kemudian disusun dalam bentuk narasi komprehensif sebagai dasar penarikan meta-inference dan kesimpulan. *Flowchart* tahapan penelitian ditampilkan dalam bentuk bagan teks yang menggambarkan alur *sequential explanatory* sebagai berikut:



Sumber: Adaptasi dari Creswell & Plano Clark (2018)

Gambar 1. Alur Penelitian Sequential Explanatory Mixed Methods

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dan Strategi Penguatan di FKIP Universitas Abulyatama

Analisis gabungan menunjukkan bahwa seluruh kelompok responden mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi evaluasi digital di Universitas

Abulyatama. Kendala tersebut mencakup kualitas jaringan yang tidak stabil, kurangnya dukungan teknis, belum adanya sistem pelaporan resmi, serta perbedaan platform antar mata kuliah yang menyebabkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Dosen dan ketua prodi mengakui bahwa belum ada kebijakan terpusat untuk standarisasi platform evaluasi, sementara mahasiswa menyoroti kendala teknis seperti kesulitan mengunggah jawaban dan risiko kehilangan koneksi selama ujian daring.

Petikan narasi responden: “Kalau ada kendala, biasanya kami komunikasikan lewat grup dosen, belum ada sistem pelaporan khusus.” (Ketua Prodi Pendidikan Biologi) “Harusnya ada sistem kampus sendiri supaya tidak bingung pakai aplikasi yang beda-beda.” (M21) “Kendalanya kadang jaringan, dan belum semua mahasiswa terbiasa dengan sistem ujian online.” (Dosen Pendidikan Bahasa Inggris)

Untuk mengatasi kendala tersebut, responden dari ketiga kelompok menyarankan strategi penguatan yang bersifat sistemik, yaitu: Meningkatkan kapasitas jaringan dan ketersediaan server kampus, Membentuk unit pendukung evaluasi digital (helpdesk) di tingkat fakultas untuk mendampingi pelaksanaan ujian daring, Menyusun SOP evaluasi digital yang seragam di seluruh program studi, dan Melaksanakan pelatihan lanjutan bagi dosen dan mahasiswa untuk memperkuat kemampuan teknis dan etika akademik dalam ujian online.

Secara keseluruhan, strategi ini akan membantu Abulyatama bergerak menuju sistem evaluasi digital yang lebih terstruktur, adil, dan efisien, dengan memastikan keberlanjutan dukungan teknis dan kesiapan sumber daya manusia di semua level akademik. Secara keseluruhan, hasil penelitian di Universitas Abulyatama menunjukkan bahwa implementasi evaluasi digital telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih berada pada tahap penguatan awal. Kesiapan infrastruktur dinilai cukup memadai, namun belum merata di seluruh unit karena masih terdapat perbedaan kualitas jaringan dan ketersediaan perangkat antar program studi. Kompetensi digital sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, tergolong adaptif dan berkembang, ditandai dengan kemampuan menggunakan berbagai platform digital dalam pelaksanaan evaluasi, seperti *Google Form*, *Edlink*, *Moodle*, *Kahoot*, dan *Quizizz*.

Meskipun demikian, pelatihan dan dukungan teknis masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan rutin, pembentukan unit teknis khusus, serta pelatihan berbasis praktik langsung. Kendala utama yang ditemukan—yakni ketidakstabilan jaringan, perbedaan platform, dan belum adanya mekanisme pelaporan kendala digital perlu ditangani melalui kebijakan kelembagaan yang jelas dan terintegrasi. Temuan ini menegaskan bahwa Universitas Abulyatama memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang siap bertransformasi menuju sistem evaluasi digital yang berkelanjutan dan berkualitas, asalkan mendapat dukungan kebijakan yang sistematis serta investasi berkelanjutan dalam peningkatan infrastruktur dan kompetensi digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi universitas dalam merancang roadmap transformasi evaluasi digital, yang melibatkan kolaborasi antara pimpinan fakultas, dosen, dan mahasiswa untuk menciptakan budaya evaluasi yang efisien, transparan, serta berorientasi pada mutu akademik dan keadilan digital.

Kendala dan Strategi Penguatan di FTK Universitas Islam Negeri Banda

Rumusan masalah selanjutnya berfokus pada identifikasi kendala yang dihadapi dan strategi penguatan yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi digital FTK UIN Ar-Raniry. Setelah infrastruktur, kebijakan, dan pelatihan diuraikan pada rumusan sebelumnya, bagian ini berupaya menggali masalah-masalah yang muncul di tingkat pelaksanaan serta merumuskan strategi solusi yang realistis berdasarkan pengalaman langsung pengguna dan kebijakan fakultas. Fokus analisis meliputi kendala teknis, kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem implementasi, dengan mempertimbangkan rekomendasi strategis dari pejabat struktural, dosen, dan mahasiswa. Bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan aktual di lapangan serta arah penguatan kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan evaluasi digital di lingkungan LPTK. Berikut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kendala Implementasi Evaluasi Digital di FTK UIN Ar-Raniry berdasarkan Kategori

No	Kategori Kendala	Uraian Kendala	Sumber Data	Kode Responden
1	Teknis	Jaringan internet tidak stabil saat ujian digital	Mahasiswa	M12, M27
2	Teknis	Gagal submit jawaban akibat koneksi putus	Dosen, Mahasiswa	D6, M30
3	Teknis	LMS/Edlink lambat saat jam sibuk	Dosen	D3
4	Teknis	Tidak ada fitur autosave saat ujian	Mahasiswa	M21
5	Teknis	Sistem error menyebabkan jawaban hilang	Mahasiswa	M19
6	Kebijakan	Tidak ada SOP evaluasi digital fakultas	Dosen, Struktural	D8, S1
keterangan		S =	Struktural	
D = Dosen		M =	Mahasiswa	

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi digital, masing-masing kelompok responden memberikan masukan strategis yang realistis dan dapat diterapkan di lingkungan FTK UIN Ar-Raniry. Dari tingkat kebijakan fakultas, Wakil Dekan II FTK UIN Ar-Raniry menekankan perlunya peningkatan infrastruktur pendukung sebagai langkah pertama penguatan

evaluasi digital. Ia menyatakan; “Langkah awal yang paling penting adalah memperbaiki stabilitas jaringan dan menambah akses WiFi khusus ujian digital agar tidak terjadi gangguan kembali.” (Wakil Dekan II FTK UIN Ar-Raniry).

Selain perbaikan infrastruktur, Wakil Dekan I FTK UIN Ar-Raniry menekankan pentingnya penataan sistem evaluasi berbasis kebijakan yang jelas, terutama dalam bentuk SOP evaluasi digital yang berlaku untuk semua program studi; “Fakultas perlu segera menetapkan SOP evaluasi digital agar pelaksanaannya seragam dan memiliki standar mutu yang bisa diawasi.” (Wakil Dekan I FTK UIN Ar-Raniry).

Dari perspektif pelaksana teknis, Operator Fakultas FTK menyarankan pembentukan tim bantuan teknis ujian digital (Digital Assessment Support Team) yang bertugas melakukan penanganan cepat ketika terjadi gangguan selama pelaksanaan evaluasi digital; “Selama ini kendala teknis saat ujian online tidak tertangani dengan cepat. Harus ada tim teknis yang standby saat ujian berlangsung.” (Operator Fakultas FTK). Hal ini juga sejalan dengan masukan dari dosen FTK UIN Ar-Raniry yang menilai pentingnya dukungan teknis dan pelatihan lanjutan dalam penggunaan sistem evaluasi digital terintegrasi; “Jangan hanya dilatih membuat soal online saja, tapi juga bagaimana mengamankan ujian, mencegah kecurangan, dan mengelola nilai secara digital.” (Dosen Pendidikan Biologi).

Sementara itu, dari perspektif mahasiswa, strategi penguatan yang paling penting adalah penyediaan simulasi ujian digital agar mahasiswa lebih siap secara teknis dan psikologis menghadapi evaluasi online. Hal ini terlihat dari pernyataan mahasiswa berikut; “Sebelum ujian resmi, sebaiknya ada simulasi dulu supaya kami paham sistem dan tidak panik saat terjadi error.” (Mahasiswa Pendidikan Biologi).

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi evaluasi digital di FTK UIN Ar-Raniry telah berjalan namun masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat teknis, kebijakan, dan implementatif. Kendala teknis yang paling dominan meliputi ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan kapasitas sistem LMS saat ujian berlangsung, serta ketiadaan fitur keamanan digital seperti auto-save dan anti-kecurangan. Dari aspek kebijakan dan tata kelola, belum tersedianya SOP evaluasi digital di tingkat fakultas membuat pelaksanaan evaluasi berjalan tanpa standar yang seragam antar dosen dan program studi. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan, dukungan teknis dinilai belum memadai karena tidak adanya helpdesk khusus yang bertugas menangani masalah teknis secara cepat saat ujian berlangsung.

Sebagai upaya penguatan, seluruh responden secara konsisten menekankan pentingnya dukungan institusional yang lebih kuat melalui: (1) peningkatan infrastruktur jaringan; (2) pembentukan Tim Dukungan Evaluasi Digital di tingkat fakultas; (3) penyusunan pedoman dan SOP evaluasi digital resmi; dan (4) pelaksanaan simulasi ujian digital serta pelatihan lanjutan bagi dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, strategi penguatan yang direkomendasikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga penguatan sistem akademik dan kelembagaan agar pelaksanaan evaluasi digital dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kebijakan dan tata kelola merupakan fondasi yang menentukan keberlanjutan implementasi sistem evaluasi digital dalam lingkungan perguruan tinggi. Pada FTK UIN Ar-Raniry, kebijakan digitalisasi pendidikan telah tercermin

melalui keberadaan strategi transformasi digital yang mendukung pelaksanaan evaluasi berbasis teknologi. Hasil penilaian dari responden struktural menunjukkan bahwa aspek kebijakan berada dalam kategori Siap (skor rata-rata 4.04). Namun demikian, kesiapan tersebut bervariasi antar dimensi kebijakan dan antar struktural.

Pada dimensi Strategi Digital, skor rata-rata sebesar 3.84 menunjukkan bahwa fakultas telah memiliki landasan kebijakan terkait pemanfaatan evaluasi digital, namun sosialisasi dokumen strategi belum merata. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan antara Wadep 2 yang menyatakan bahwa dokumen strategi digital lengkap dan telah diimplementasikan, sementara Wadep 1 menilai kebijakan masih dalam tahap penyusunan dan belum terimplementasi penuh di tingkat akademik. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antar level struktural.

Dimensi Anggaran dan Investasi memperoleh skor 4.11 yang masuk kategori Baik. Data menunjukkan bahwa pendanaan digitalisasi dikelola secara terpusat melalui universitas, terutama melalui PTIPD. Wadep 2 dan operator prodi menyatakan bahwa pengembangan sistem evaluasi digital telah mendapatkan dukungan anggaran, namun Kaprodi dan Wadep 1 melihat bahwa tidak ada alokasi khusus di tingkat prodi atau fakultas, sehingga pelaksanaan evaluasi digital sering bergantung pada inisiatif dosen dan ketersediaan perangkat pribadi.

Dimensi Struktur Organisasi memiliki skor tertinggi, yaitu 4.30 (Sangat Siap). Hal ini menunjukkan bahwa FTK UIN Ar-Raniry telah memiliki penanggung jawab yang jelas dalam implementasi evaluasi digital, baik di tingkat universitas (PTIPD) maupun fakultas (Wakil Dekan II). Selain itu, keberadaan operator fakultas dan operator program studi memperkuat tata kelola administratif evaluasi digital. Namun, belum ada unit khusus digitalisasi di tingkat fakultas, sehingga koordinasi kebijakan masih bersifat sentralistik dari universitas.

Dimensi terakhir yaitu Monitoring dan Evaluasi memperoleh skor terendah yaitu 3.59 (Cukup Siap). Proporsi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan evaluasi digital sudah berjalan, belum ada mekanisme evaluasi yang terstruktur dan periodik untuk mengukur efektivitas kebijakan. Laporan perkembangan digitalisasi juga belum dipublikasikan secara konsisten ke seluruh stakeholder akademik, sehingga informasi sering hanya beredar di tingkat pimpinan. Secara keseluruhan, hasil RM 2 menunjukkan bahwa kebijakan dan tata kelola kelembagaan untuk evaluasi digital di FTK UIN Ar-Raniry sudah tersedia namun belum optimal dalam hal pemerataan implementasi dan monitoring. Kekuatan terbesar ada pada aspek struktur organisasi, namun diperlukan penguatan pada aspek komunikasi kebijakan, transparansi anggaran, dan konsistensi monitoring evaluasi digital agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi digital, masing-masing kelompok responden memberikan masukan strategis yang realistis dan dapat diterapkan di lingkungan FTK UIN Ar-Raniry. Dari tingkat kebijakan fakultas, Wakil Dekan II FTK UIN Ar-Raniry menekankan perlunya peningkatan infrastruktur pendukung sebagai langkah pertama penguatan evaluasi digital. Ia menyatakan; “Langkah awal yang paling penting adalah memperbaiki stabilitas jaringan dan menambah akses WiFi khusus ujian digital agar tidak terjadi gangguan kembali.” (Wakil Dekan II FTK UIN Ar-Raniry).

Selain perbaikan infrastruktur, Wakil Dekan I FTK UIN Ar-Raniry menekankan pentingnya penataan sistem evaluasi berbasis kebijakan yang jelas,

terutama dalam bentuk SOP evaluasi digital yang berlaku untuk semua program studi; “Fakultas perlu segera menetapkan SOP evaluasi digital agar pelaksanaannya seragam dan memiliki standar mutu yang bisa diawasi.” (Wakil Dekan I FTK UIN Ar-Raniry).

Dari perspektif pelaksana teknis, Operator Fakultas FTK menyarankan pembentukan tim bantuan teknis ujian digital (Digital Assessment Support Team) yang bertugas melakukan penanganan cepat ketika terjadi gangguan selama pelaksanaan evaluasi digital; “Selama ini kendala teknis saat ujian online tidak tertangani dengan cepat. Harus ada tim teknis yang standby saat ujian berlangsung.” (Operator Fakultas FTK). Hal ini juga sejalan dengan masukan dari dosen FTK UIN Ar-Raniry yang menilai pentingnya dukungan teknis dan pelatihan lanjutan dalam penggunaan sistem evaluasi digital terintegrasi: “Jangan hanya dilatih membuat soal online saja, tapi juga bagaimana mengamankan ujian, mencegah kecurangan, dan mengelola nilai secara digital.” (Dosen Pendidikan Biologi).

Sementara itu, dari perspektif mahasiswa, strategi penguatan yang paling penting adalah penyediaan simulasi ujian digital agar mahasiswa lebih siap secara teknis dan psikologis menghadapi evaluasi online. Hal ini terlihat dari pernyataan mahasiswa berikut; “Sebelum ujian resmi, sebaiknya ada simulasi dulu supaya kami paham sistem dan tidak panik saat terjadi error.” (Mahasiswa Pendidikan Biologi).

Berikut disajikan Tabel perbandingan kendala yang dialami oleh kedua institusi:

Tabel 3. Perbandingan Kendala Implementasi Evaluasi Digital di FKIP Universitas Abulyatama dan FTK UIN Ar-Raniry

Dimensi Kendala	FKIP Universitas Abulyatama (LPTK Swasta)	FTK UIN Ar-Raniry (LPTK Negeri)	Kategori
Infrastruktur Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas jaringan tidak stabil • Fragmentasi platform (Google Form, Edlink, Moodle, Kahoot, Quizizz) • Kesulitan mahasiswa mengunggah jawaban • Risiko kehilangan koneksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakstabilan jaringan internet • Keterbatasan kapasitas server LMS saat ujian • Belum ada fitur keamanan digital (auto-save, anti-kecurangan) 	UNIVERSAL (Kendala Umum)
Kebijakan dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan terpusat standarisasi platform • Tidak ada sistem pelaporan resmi kendala digital • Perbedaan platform antar mata kuliah • Belum ada SOP evaluasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada SOP evaluasi digital di tingkat fakultas • Tidak ada standar seragam antar prodi • Lemah dalam monitoring dan evaluasi • Koordinasi kebijakan dari universitas ke fakultas terhambat birokrasi 	UNIVERSAL (Kendala Umum)

Pelatihan dan Dukungan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada unit pendukung evaluasi digital (helpdesk) • Kendala teknis tidak tertangani cepat • Belum ada sistem pelaporan khusus • Komunikasi kendala hanya via grup dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan hanya fokus teknis pembuatan soal online • Belum mencakup keamanan ujian dan pencegahan kecurangan • Tidak ada helpdesk khusus evaluasi digital • Dukungan teknis tidak responsif 	UNIVERSAL (Kendala Umum)
Kompetensi Pengguna	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua mahasiswa terbiasa sistem ujian online • Perlu pelatihan berbasis praktik langsung • Adaptasi platform berbeda-beda membingungkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen perlu pelatihan lanjutan • Mahasiswa butuh simulasi ujian digital • Gap literasi digital masih ada 	UNIVERSAL (Kendala Umum)
Sistem Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sistem terpusat • Fleksibilitas tinggi tapi fragmentasi platform • Keputusan lebih cepat tapi tidak standar 	<ul style="list-style-type: none"> • LMS terintegrasi tapi kapasitas terbatas • Dukungan PTIPD ada tapi koordinasi lambat • Birokrasi kompleks dari universitas ke fakultas 	SPESIFIK- INSTITUSIONAL (Berbeda)

Keterangan: Tabel menunjukkan perbandingan kendala dengan FKIP Universitas Abulyatama (LPTK Swasta) di kolom pertama dan FTK UIN Ar-Raniry (LPTK Negeri) di kolom kedua. Kategori "Universal" menunjukkan kendala yang dialami kedua institusi, sedangkan "Spesifik-Institusional" menunjukkan kendala yang berbeda berdasarkan karakteristik kelembagaan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat dilihat bahwa implementasi evaluasi digital di FTK UIN Ar-Raniry telah berjalan namun masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat teknis, kebijakan, dan implementatif. Kendala teknis yang paling dominan meliputi ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan kapasitas sistem LMS saat ujian berlangsung, serta ketiadaan fitur keamanan digital seperti auto-save dan anti-kecurangan. Dari aspek kebijakan dan tata kelola, belum tersedianya SOP evaluasi digital di tingkat fakultas membuat pelaksanaan evaluasi berjalan tanpa standar yang seragam antar dosen dan program studi. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan, dukungan teknis dinilai belum memadai karena tidak adanya helpdesk khusus yang bertugas menangani masalah teknis secara cepat saat ujian berlangsung.

Sebagai upaya penguatan, seluruh responden secara konsisten menekankan pentingnya dukungan institusional yang lebih kuat melalui: (1) peningkatan infrastruktur jaringan; (2) pembentukan Tim Dukungan Evaluasi Digital di tingkat fakultas; (3) penyusunan pedoman dan SOP evaluasi digital resmi; dan (4)

pelaksanaan simulasi ujian digital serta pelatihan lanjutan bagi dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, strategi penguatan yang direkomendasikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga penguatan sistem akademik dan kelembagaan agar pelaksanaan evaluasi digital dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Meskipun kendala universal mendominasi, terdapat perbedaan pola kendala yang mencerminkan karakteristik kelembagaan masing-masing institusi. FTK UIN Ar-Raniry sebagai LPTK negeri memiliki keunggulan berupa sistem LMS terintegrasi yang dikembangkan oleh PTIPD universitas. Namun, keunggulan ini justru menimbulkan kendala spesifik berupa keterbatasan kapasitas server ketika diakses secara bersamaan oleh ribuan mahasiswa, serta birokrasi yang kompleks dalam koordinasi antara universitas, PTIPD, dan fakultas. Proses pengambilan keputusan untuk perbaikan atau pengembangan sistem memerlukan waktu lama karena harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Dekan II FTK UIN Ar-Raniry: "Sistem sudah ada dari universitas, tapi kalau mau ada perubahan atau perbaikan, prosesnya lama karena harus koordinasi ke PTIPD dan pimpinan universitas."

Sebaliknya, FKIP Universitas Abulyatama sebagai LPTK swasta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan dan tidak terikat pada sistem terpusat universitas. Namun, fleksibilitas ini justru menimbulkan kendala fragmentasi platform evaluasi. Setiap dosen bebas memilih platform sesuai preferensinya mulai dari *Google Form*, *Edlink*, *Moodle*, *Kahoot*, hingga *Quizizz* yang membingungkan mahasiswa karena harus beradaptasi dengan berbagai sistem yang berbeda-beda. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Abulyatama menyatakan: "Harusnya ada sistem kampus sendiri supaya tidak bingung pakai aplikasi yang beda-beda. Mahasiswa sering komplain karena setiap dosen pakai platform berbeda." Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa sistem terpusat dan kebijakan standarisasi, fleksibilitas justru dapat menjadi sumber masalah baru.

Analisis komparatif mengungkapkan bahwa karakteristik kelembagaan (negeri versus swasta) mempengaruhi tidak hanya jenis kendala, tetapi juga strategi yang paling tepat untuk mengatasinya. FTK UIN Ar-Raniry memerlukan penguatan koordinasi internal dan percepatan proses birokrasi untuk perbaikan sistem, sementara infrastruktur dasarnya sudah tersedia. Strategi penguatan yang direkomendasikan untuk FTK UIN Ar-Raniry mencakup: (1) pembentukan tim koordinasi lintas unit antara fakultas dan PTIPD; (2) peningkatan kapasitas server dan bandwidth khusus untuk evaluasi digital; (3) penyusunan SOP fakultas yang selaras dengan kebijakan universitas namun responsif terhadap kebutuhan spesifik program studi kependidikan; serta (4) pembentukan Digital Assessment Support Team di tingkat fakultas untuk memberikan dukungan teknis yang responsif.

Sementara itu, FKIP Universitas Abulyatama memerlukan penguatan dari aspek kebijakan dan infrastruktur terpusat. Meskipun fleksibilitas kelembagaannya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, institusi ini memerlukan investasi dalam pengembangan sistem evaluasi digital terpusat dan penetapan kebijakan standarisasi *platform*. Strategi penguatan yang direkomendasikan untuk FKIP Universitas Abulyatama mencakup: (1) pengembangan atau pengadaan sistem LMS terpusat di tingkat fakultas; (2) penetapan kebijakan standarisasi platform evaluasi yang wajib digunakan; (3) alokasi anggaran khusus untuk lisensi

platform dan peningkatan infrastruktur jaringan; (4) pembangunan sistem pelaporan dan penanganan kendala digital yang responsif; serta (5) penyelenggaraan simulasi ujian digital secara rutin untuk mempersiapkan mahasiswa secara teknis dan psikologis.

Pembahasan

Kendala Implementasi Evaluasi Digital di FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi evaluasi pembelajaran digital di FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama menghadapi kendala multidimensional yang mencakup aspek teknis, kebijakan, dan sumber daya manusia. Kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan evaluasi digital dapat dipahami melalui kerangka kerja digital readiness yang mencakup berbagai dimensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang muncul di FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama mencerminkan dimensi kesiapan digital sebagaimana dikemukakan oleh Chounta et al. (2024), khususnya pada aspek infrastruktur teknologi, kompetensi digital pengguna, serta kebijakan dan strategi kelembagaan. Selain itu, Graham et al. (2013) menekankan bahwa keberhasilan integrasi teknologi pembelajaran di perguruan tinggi sangat bergantung pada adanya kerangka adopsi dan implementasi kelembagaan yang sistematis, yang dalam penelitian ini masih menunjukkan celah pada level fakultas dan program studi. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, temuan kendala teknis dan pedagogis yang dialami kedua LPTK juga sejalan dengan Gokulkumari et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa praktik ujian elektronik di pendidikan tinggi memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kualitas pembelajaran dan keadilan evaluasi.

Kendala teknis menjadi hambatan paling dominan di kedua institusi, terutama terkait ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan kapasitas sistem LMS. Di FTK UIN Ar-Raniry, meskipun telah memiliki sistem LMS terintegrasi yang dikembangkan oleh PTIPD, kapasitas server masih belum mampu menampung akses simultan dalam jumlah besar saat pelaksanaan ujian daring. Sementara itu, FKIP Universitas Abulyatama menghadapi kendala fragmentasi platform karena tidak adanya sistem terpusat, sehingga mahasiswa harus beradaptasi dengan berbagai platform berbeda yang digunakan oleh masing-masing dosen. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi merupakan faktor dominan yang menghambat kesiapan implementasi e-learning di negara berkembang. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem dan perangkat, tetapi juga dengan stabilitas dan kualitas jaringan yang mendukung proses pembelajaran dan evaluasi digital (Ate et al., 2021; Limani et al., 2019). Dalam konteks wilayah seperti Aceh, permasalahan teknis ini semakin kompleks akibat adanya disparitas kualitas akses internet antara lingkungan kampus dan domisili mahasiswa, yang berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi daring (Fathushahib et al., 2021; Irfan et al., 2022).

Dari aspek kebijakan dan tata kelola, kedua institusi menghadapi kendala serupa berupa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi digital yang baku di tingkat fakultas. Di FTK UIN Ar-Raniry, meskipun terdapat kebijakan digitalisasi di tingkat universitas melalui PTIPD, implementasinya di tingkat

fakultas belum memiliki panduan teknis yang jelas dan seragam antar program studi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan evaluasi digital berjalan tanpa standar yang konsisten. Kondisi serupa juga terjadi di FKIP Universitas Abulyatama yang belum memiliki kebijakan terpusat untuk standarisasi platform evaluasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Esteve-Mon et al. (2023) yang menekankan pentingnya pendekatan strategis dalam implementasi alat dan proses digital di pendidikan tinggi. Begitu juga Elena dan Aleksandra (2020) juga menegaskan bahwa kesiapan universitas dalam pengenalan teknologi pendidikan digital memerlukan kebijakan kelembagaan yang sistematis dan terstruktur. Ketiadaan SOP ini berdampak pada inkonsistensi praktik evaluasi digital antar dosen dan program studi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan keadilan dalam penilaian mahasiswa.

Kendala kompetensi sumber daya manusia menjadi aspek kritis yang ditemukan di kedua institusi. Meskipun dosen dan mahasiswa telah menunjukkan kemampuan adaptif dalam menggunakan berbagai platform digital, pelatihan yang diterima masih bersifat sporadis dan belum sistematis. Di FTK UIN Ar-Raniry, pelatihan yang diberikan lebih fokus pada aspek teknis pembuatan soal online, namun belum mencakup aspek keamanan ujian, pencegahan kecurangan, dan pengelolaan nilai secara digital. Ketiadaan program pelatihan terstruktur di FKIP Universitas Abulyatama menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital sivitas akademika, khususnya dalam konteks evaluasi pembelajaran, belum ditempatkan sebagai agenda strategis kelembagaan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi sangat bergantung pada pengetahuan dosen dan kesiapan institusi, bukan semata pada ketersediaan platform digital. Bagi LPTK, lemahnya penguatan kompetensi digital tidak hanya berdampak pada kualitas evaluasi pembelajaran internal, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya pembentukan literasi evaluasi digital calon guru, sehingga integrasi teknologi dalam pembelajaran berisiko berlangsung parsial dan tidak berkelanjutan (Ertmer et al., 2006; Teo & Zhou, 2014; Werdiningsih et al., 2022). Selain itu, ketiadaan dukungan teknis yang memadai saat pelaksanaan evaluasi digital menjadi kendala serius, terutama ketika terjadi gangguan teknis selama ujian berlangsung. Mahasiswa dan dosen mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan cepat karena belum ada mekanisme helpdesk khusus yang bertugas menangani permasalahan evaluasi digital.

Perbandingan antara kedua institusi menunjukkan pola yang menarik. FTK UIN Ar-Raniry sebagai institusi negeri memiliki keunggulan dari segi infrastruktur terpusat dan dukungan kelembagaan dari universitas, namun menghadapi kendala birokrasi dan koordinasi yang lebih kompleks dalam implementasi kebijakan digital dari tingkat universitas ke fakultas. Sebaliknya, FKIP Universitas Abulyatama sebagai institusi swasta memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mengadopsi berbagai platform digital, namun menghadapi kendala fragmentasi dan inkonsistensi karena tidak adanya sistem terpusat. Perbedaan pola kendala yang muncul pada kedua institusi mencerminkan pengaruh karakteristik kelembagaan terhadap cara teknologi pendidikan diadopsi dan diimplementasikan, sebagaimana ditunjukkan dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Namun, kesamaan yang ditemukan pada aspek ketidaksiapan kebijakan dan lemahnya dukungan teknis menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat institusional, melainkan mencerminkan masalah sistemik yang melampaui konteks masing-masing lembaga. Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang

lebih terstruktur dan terkoordinasi di tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi teknologi pendidikan (Aydın & Tasci, 2005; Rodríguez-Abitia & Bribiesca-Correa, 2021).

Strategi Penguatan Evaluasi Digital di LPTK

Berdasarkan temuan kendala yang teridentifikasi, strategi penguatan yang direkomendasikan oleh responden dari kedua institusi menunjukkan konsistensi dan dapat dikategorikan menjadi empat pilar utama. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi yang mencakup stabilisasi jaringan internet, penambahan kapasitas server, dan penyediaan akses WiFi khusus untuk keperluan evaluasi digital. Strategi ini merupakan fondasi dasar yang harus diprioritaskan, sebagaimana ditekankan oleh Ulimaz et al. (2024) bahwa infrastruktur teknologi menjadi prasyarat fundamental dalam adaptasi inovasi pendidikan digital. Kedua, pembentukan unit dukungan teknis evaluasi digital (*Digital Assessment Support Team*) di tingkat fakultas yang bertugas memberikan pendampingan dan penanganan cepat terhadap kendala teknis selama pelaksanaan evaluasi digital. Keberadaan tim ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses evaluasi dan memberikan rasa aman kepada dosen dan mahasiswa, sejalan dengan rekomendasi Graham et al. (2013) tentang pentingnya dukungan kelembagaan dalam adopsi teknologi pembelajaran.

Ketiga, penyusunan dan penetapan SOP evaluasi digital yang seragam di seluruh program studi untuk memastikan standarisasi praktik, keadilan penilaian, dan mutu akademik yang konsisten. Kebijakan ini harus mencakup aspek teknis pelaksanaan, mekanisme pengawasan, prosedur penanganan kendala, dan sistem pelaporan evaluasi. Kebutuhan akan kebijakan evaluasi digital yang terstruktur menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kebijakan yang jelas, konsisten, dan sistematis. Kebijakan tersebut perlu diikuti oleh strategi penguatan kapasitas pengguna melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan simulasi ujian digital bagi dosen dan mahasiswa. Pelatihan yang hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan platform berpotensi menghasilkan praktik evaluasi yang parsial, sehingga perlu diperluas mencakup dimensi pedagogis, keamanan evaluasi, pencegahan kecurangan akademik, serta etika digital. Selain itu, simulasi ujian sebelum pelaksanaan evaluasi resmi berperan penting dalam meningkatkan kesiapan teknis dan psikologis mahasiswa, sekaligus memungkinkan institusi mengidentifikasi potensi kendala sejak dini. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesiapan pengguna merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi evaluasi digital dan harus menjadi bagian integral dari strategi transformasi digital pendidikan (Gokulkumari et al., 2022; Kamilia & Wahyudin, 2021; Kodri, 2022; Nashrullah et al., 2025).

Implementasi strategi penguatan ini memiliki implikasi khusus bagi LPTK sebagai lembaga yang mencetak calon guru. LPTK tidak hanya perlu mengimplementasikan evaluasi digital secara efektif untuk kepentingan internal, tetapi juga harus menjadi model praktik terbaik yang dapat ditiru oleh lulusannya ketika mengajar di sekolah. Sebagaimana ditekankan oleh Nurjannah et al. (2024), program MBKM menuntut LPTK untuk memperkuat literasi digital calon guru agar mampu menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Oleh karena itu, strategi penguatan evaluasi digital di LPTK harus dirancang tidak hanya untuk mengatasi kendala teknis dan administratif, tetapi juga untuk membentuk budaya evaluasi

digital yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan visi transformasi digital pendidikan Indonesia yang dicanangkan dalam berbagai kebijakan nasional, sebagaimana dianalisis oleh Khoiri & Sutrisno, (2023) dan Milwan et al., (2024) dalam konteks implementasi MBKM di perguruan tinggi.

Temuan penelitian ini memperkaya literatur tentang kesiapan digital di perguruan tinggi Indonesia, khususnya LPTK di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Penelitian Yuma Lestari (2019) yang menganalisis kesiapan e-learning di Program Studi Pendidikan Biologi FTK UIN Ar-Raniry telah mengidentifikasi beberapa kendala awal, dan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kendala tersebut masih persisten hingga saat ini, terutama dalam aspek kesiapan sistem dan dukungan teknis. Integrasi temuan ini dengan kerangka kerja digital readiness yang dikembangkan oleh Chounta et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional sangat penting dalam menilai dan mengembangkan kesiapan digital institusi. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang variasi pola kendala berdasarkan karakteristik kelembagaan (negeri versus swasta), yang belum banyak dikaji dalam konteks LPTK di Indonesia. Temuan komparatif ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih kontekstual dan adaptif sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing institusi.

SIMPULAN

Implementasi evaluasi digital di FTK UIN Ar-Raniry dan FKIP Universitas Abulyatama menghadapi kendala multidimensional dalam empat dimensi: infrastruktur, kebijakan, pelatihan, dan kompetensi SDM. Karakteristik kelembagaan mempengaruhi strategi penguatan yang efektif, di mana FTK UIN Ar-Raniry sebagai LPTK negeri memerlukan percepatan koordinasi internal, sedangkan FKIP Universitas Abulyatama sebagai LPTK swasta memerlukan pengembangan sistem terpusat. Strategi penguatan mencakup empat pilar (infrastruktur, unit dukungan teknis, SOP, dan pelatihan berkelanjutan) yang harus diimplementasikan secara sistematis dan kontekstual tidak ada solusi *one-size-fits-all* untuk mewujudkan evaluasi digital yang berkelanjutan di LPTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ate, A., Zaineldeenc, S., Zhaohui, C., & Zhao, Y. (2021). Assessing the E-learning Readiness of Universities in Developing Countries and Expected Obstacles. *Makara Journal of Technology*, 25(3). <https://doi.org/10.7454/mst.v25i3.4047>
- Awang, M. I. (2021). The Digitalization of Learning Assessment. *Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32672/pic-mr.v4i1.3731>
- Aydın, C. H., & Tasci, D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country. *Journal of Educational Technology & Society*, 8(4), 244–257.

- Chounta, I.-A., Ortega-Arranz, A., Daskalaki, S., Dimitriadis, Y., & Avouris, N. (2024). Toward a data-informed framework for the assessment of digital readiness of higher education institutions. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21(1), 59. <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00491-0>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.)* (3 rd). SAGE Publications. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2697821>
- Elena, M., & Aleksandra, M. (2020). Analysis of Universities' Readiness for the Introduction of Digital Educational Technologies and Products. *Management of the Personnel and Intellectual Resources in Russia*, 9(1), 48–53. <https://doi.org/10.12737/2305-7807-2020-48-53>
- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A., & York, C. S. (2006). *Exemplary Technology-using Teachers: Perceptions of Factors Influencing Success*.
- Esteve-Mon, F. M., Postigo-Fuentes, A. Y., & Castañeda, L. (2023). A strategic approach of the crucial elements for the implementation of digital tools and processes in higher education. *Higher Education Quarterly*, 77(3), 558–573. <https://doi.org/10.1111/hequ.12411>
- Fathushahib, F., Marselia, M., & Sitompul, N. (2021). Analisis Tingkat Kesiapan Implementasi E-Learning Di Perguruan Tinggi Wilayah Perbatasan (Studi Kasus: Kabupaten Sambas). *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*, 3(1), 8–17. <https://doi.org/10.54650/jusibi.v3i1.304>
- Gokulkumari, G., Al-Hussain, T., Akmal, S., & Singh, P. (2022). Analysis of E-Exam practices in higher education institutions of KSA: Learners' perspectives. *Advances in Engineering Software*, 173, 103195. <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103195>
- Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. *The Internet and Higher Education, Blended Learning in Higher Education: Policy and Implementation Issues*, 18, 4–14. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.003>
- Irfan, A., Alfurqan, A., & Safriana, S. (2022). Analisis Kesiapan Penerapan E-Learning pada Sekolah Menengah Pertama di Banda Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30601/dedikasi.v6i2.2902>
- Kambau, R. A. (2024). Proses Transformasi Digital pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.481>
- Kamilia, F. F. S. K., & Wahyudin, D. (2021). Evaluasi Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Jenjang Pendidikan Tinggi. *Inovasi Kurikulum*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jik.v18i2.37310>
- Khoiri, N., & Sutrisno, S. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI PERGURUAN TINGGI PADA MASA PANDEMI COVID 19. *Irfani*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.30603/ir.v19i1.3133>

- Kodri, M. N. A. (2022). Digital Transformation In Higher Education: Challenges, Opportunities And Threats. *Proceeding of Seminar on Language, Education, and Technology*, 1, 9–20. <https://doi.org/10.54895/let.v1i1.1535>
- Limani, Y., Hajrizi, E., Stapleton, L., & Retkoceri, M. (2019). Digital Transformation Readiness in Higher Education Institutions (HEI): The Case of Kosovo. *IFAC-PapersOnLine, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2019*, 52(25), 52–57. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.445>
- Milwan, M., Suharno, S., & Prasetyo, D. (2024). Evaluation the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Programme in Indonesia: Sustainability and Challenges. *International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.37329/ijms.v2i3.3167>
- Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & Budiyanto. (2025). Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Nurjannah, S., Alhudawi, U., & Hodriani, H. (2024). Telaah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam Memperkuat Soft Skill Mahasiswa. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 3(1), Article 1.
- Rodríguez-Abitia, G., & Bribiesca-Correa, G. (2021). Assessing Digital Transformation in Universities. *Future Internet*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/fi13020052>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods): Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi (mixed methods)*. CV Alfabeta.
- Teo, T., & Zhou, M. (2014). Explaining the intention to use technology among university students: A structural equation modeling approach. *Journal of Computing in Higher Education*, 26(2), 124–142. <https://doi.org/10.1007/s12528-014-9080-3>
- Tsani, I., Efendi, R., & Sufirmansyah, S. (2020). Evaluasi kesiapan lembaga pendidikan tinggi Islam dalam menghadapi era digital. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 019–033. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2604>
- Ulimaz, A., Sembiring, D., Amahoru, A., Suwarsito, S., & Ahyani, E. (2024). Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam Mengadaptasi Potensi Teknologi Metaverse dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15919>
- Werdiningsih, D., Sunismi, Setiawan, Y., Khoiriyah, N., & Mardiyani, S. (2022). *The Effect of Lecturer Knowledge and College Readiness on the Successful Implementation of MBKM and the Impact of MBKM on Learning*. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Effect-of-Lecturer-Knowledge-and-College-on-the-Werdiningsih-Sunismi/9adc157efd1aec78b7a5c209d9a0e83fed038949>
- Yuma Lestari, 140212007. (2019). *Analisis Tingkat Kesiapan Penerapan E-Learning Pada Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*

UIN Ar-Raniry Banda Aceh. [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
<http://library.ar-raniry.ac.id/>